Perkawinan yang tidak diperbolehkan antara Suku Jawa dengan Suku Sunda

Fandy Kusuma Faizal

Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada

Email: fandy121220@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia, oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. (Thomas Wiyasa Bratawijaya, 1990: 9). Pada hakekatnya, manusia perlu melakukan perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh keturunan, saling membantu dan membahagiakan satu sama lain.

Indonesia adalah Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu dengan disyahrkannya Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara Yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. (Kaharuddin, 2015: 83). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pokok pembicaraan mengenai perkawinan tentunya sangat menarik untuk dibahas, karena bukan hanya menyangkut kebiasaan dan hajat hidup manusia yang asasi. Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antar anggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Suatu perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup karena perkawinan itu sendiri merupakan peristiwa yang suci, sakral dan menjadi kenangan seumur hidup. Perkawinan juga merupakan lambang kehormatan, kejayaan, prestasi dan prestise orang tua serta sepasang pengantin. Sebagai peristiwa yang tidak mungkin terulang kembali dalam seumur hidup, pernikahan harus dibuat indah, elok, simpatik, dengan pesona keagungan penuh kharisma. Oleh karena itu pernikahan harus dilaksanakan secara mengesankan dan memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan impian sepasang pengantin. (Heru Tri Febriantiko, 2014: 100).

Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam (1999: 4), perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diajarkan oleh agama Islam.

Perkawinan merupakan salah satu momen yang sangat sakral dan diidamkan oleh setiap pasangan. Banyak yang bersedia menjalani hubungan selama bertahun-tahun lamanya demi mengenal satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri, hubungan yang sudah terjalin lama terkadang kandas ditengah jalan. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan tradisi maupun kepercayaan yang dianut oleh keluarga pasangan. Contohnya, mitos orang Sunda yang tidak memperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang Jawa.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, juga bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Analisis Dan Pembahasan

Asal muasal tidak diperbolehkannya orang Sunda melakukan perkawinan dengan orang Jawa.

Mitos ini pertama kali berkembang sejak peristiwa Perang Bubat. Perang ini diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citaresmi dari Negeri Sundan. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri Dyah karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit, yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman bernama Sungging Prabangkara. Namun ada pula yang mengatakan, alasan utama Hayam Wuruk berniat memperistri Dyah Pitaloka karena didorong oleh kepentingan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan Negeri Sunda. Namun saat Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka, terjadi sebuah kesalahpahaman. Menurut Kidung Sundayana, alih-alih menyambut kedatangan rombongan Kerajaan Sunda, Patih Gajah Mada menganggap kedatangan mereka sebagai bentuk penyerahan diri, karena ia ingin memenuhi Sumpah Palapa.

Dalam sumpah tersebut, Gajah Mada berniat ingin menaklukkan semua kerajaan di seluruh Nusantara. Namun ternyata, hanya Kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai oleh Majapahit. Kemudian terjadilah perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Perang Bubat ini berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, dan para pejabat kerajaan beserta segenap keluarga Kerajaan Sunda. Konon katanya, Putri Dyah Pitaloka memutuskan untuk melakukan bela pati (bunuh diri) untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya.

Terkait penyebab awal mula Perang Bubat ini, beberapa penulis fiksi sejarah ada yang berpendapat bahwa perasaan cinta Gajah Mada terhadap Dyah Pitaloka Citraresmi yang akan dipinang oleh rajanya sendiri menjadi sebab terjadinya perang bubat, Gajah Mada sengaja memperkeruh suasana agar acara pernikahan pujaan hatinya dan sang raja dapat dibatalkan. Pasca Perang Bubat, kepercayaan Raja Hayam Wuruk terhadap Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada yang telah berjasa besar bagi Kerajaan Majapahit semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan pemberian Hayam Wuruk berupa tanah di Madakaripura (Probolinggo) untuk Gajah Mada, yang dapat diartikan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mempertimbangkan untuk pensiun. Adapun Maharaja Linggabuana Wisesa yang gugur diberi gelar sebagai "Prabu Wangi" oleh masyarakat sunda untuk mengenang sikap ksatrianya karena telah memperjuangkan harkat dan martabat sunda pada perang bubat.

Dampak dari peristiwa tersebut, hubungan kedua kerajaan jadi tidak harmonis. Pangeran Niskalawatu Kancana, adik Dyah Pitaloka yang tidak ikut dalam rombongan akhirnya naik takhta. Dia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit sekaligus mengeluarkan larangan *esti ti luaran* (beristeri dari luar) bagi kalangan kerabat Kerajaan Sunda. Peraturan tersebut kemudian diartikan sebagai larangan menikah dengan orang Jawa. Dari sinilah mitos orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa bermula. Bahkan, jika ada yang nekat melakukannya, konon rumah tangga mereka tidak akan berlangsung lama.

Apakah Perang Bubat merupakan Fakta atau Fiksi?

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, para sejarawan kita sejauh ini masih memegang kesimpulan bahwa kisah perang bubat anantara Majapahit dan Kerajaan Sunda hanyalah sebuah Fiksi. Pendapat ini dikarenakan sejauh ini kisah tentang perang bubat hanya dimuat didalam karya - karya fiksi dan digubah pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sementara *Kakawin Nagarakertagama* gubahan Mpu Prapanca pada era Pemerintahan Hayam Wuruk serta *Catatan Perjalanan Bujangga Manik* yang sempat singgah di Bubat tidak mengisahkan perihal perang antara Majapahit dan rombongan pengantin Kerajaan Sunda. Selain itu beberapa Naskah Kuno yang memuat kisah tentang perang ini memiliki perbedaan kisah dan pandangan. Semisal *Kidung Sunda*, *Kidung Sundayana*, *Babad Dalem*, *Hikayat Sang Bima* dan *Serat Pararaton* cenderung menyalahkan Gajah Mada sebagai pemicu perang tersebut.

Sementara *Carita Parahyangan* cenderung menyalahkan Dyah Pitaloka sebagai pemicu perang di Lapangan Bubat ini. Menurut para Sejarawan kita, kisah perang bubat ini sengaja dirancang oleh Pemerintah Kolonial untuk melakukan Politik Adu Domba (*Devide et Impera*) terhadap masyarakat Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur, hal ini mengingat bahwa kolonial mempunyai kepentingan dari terkotak - kotaknya masyarakat Nusantara (Indonesia) kala itu. (Sri Wintala Achmad, 2019: 285. Perang Bubat (1279 Saka) membongkar fakta Kerajaan Sunda VS Kerajaan Majapahit).

Apakah Masyarakat era saat ini masih mempercayai mitos terkait larangan perkawinan antara suku Sunda dengan Suku Jawa?

Mengutip postingan *Instagram* tanggal 08 Desember 2021 oleh Gubernur Jawa Barat @ridwankamil tentang Gadis Sunda dilarang menikahi lelaki Jawa? Itu hanya mitos yang diproduksi dalam menafsirkan peristiwa bersejarah Perang Bubat yang sudah jauh lewat dan memiliki multitafsir sejarah. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersepakat dengan kami di Pemprov Jawa Barat untuk terus membangun narasi persatuan dan perdamaian di tengah bisingsnya ruang informasi bangsa ini dengan banyaknya tontonan pertengkaran di level elit dan akar rumput. Di Jogja sudah hadir Jalan Pajajaran dan Jalan Siliwangi. Sementara di Bandung hadir Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk. Banyak yang tidak tahu, jika Alun-alun Utara Jogjakarta salah satu pohon beringin yang bernama Wijayandaru adalah pohon yang bibitnya diambil dari Keraton Pajajaran. Tarian Bedhoyo Sapto ciptaan Sri Sultan HB IX, adalah terjemahan dari Serat Pajajaran yang diekspresikan dalam sendra tari keraton Jogja.

Bisa jadi beberapa masyarakat Sunda tidak mengetahui pastinya asal muasal mitos larangan tersebut. Contoh paling dekat, Kakek penulis keturunan Sunda dan Nenek keturunan Jawa, bisa disimpulkan mitos tersebut sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Apalagi kisah Perang Bubat ini merupakan rancangan Pemerintah Kolonial saat itu yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya kita tidak mudah termakan isu SARA yang dengan sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab guna mengambil keuntungan dari perpecahan yang terjadi.

KESIMPULAN

Wacana ataupun Mitos terkait orang Sunda yang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang Jawa merupakan suatu cerita sejarah yang sudah menjadi multitafsir. Jangan sampai kita termakan isu-isu yang tidak jelas, sehingga akan merusak masa depan generasi penerus bangsa. Perlu ditanamkan dalam jati diri masing-masing sesuai dengan Semboyan Negara kita, “*Bhineka Tunggal Ika*” yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Perkara jodoh, maut dan rezeki merupakan Rahasia Illahi. Sudah menjadi kehendak Tuhan yang menciptakan Alam Semesta ini.

REFERENSI

Heru Tri Febriantiko, Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX”, dalam *Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah* Volume 2, No. 2, Juni 2014.

Kaharuddin Sulkhad, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mitra Wacana Medi, 2015

K.H. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, 1999

Ridwan Kamil, Postingan *Instagram* Gadis Sunda dilarang menikahi lelaki Jawa? 08 Desember 2021. <https://www.instagram.com/p/CXNQfSpFhA2/>

Sri Wintala Achmad, Perang Bubat (1279 Saka) Membongkar Fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit, Araska Publisher, 2019

Thomas Wiyasa Bratawijaya, Upacara Perkawinan Adat Sunda, Pustaka Sinar Harapan, 1990